

PENGARUH ELIT POLITIK INDONESIA DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA : KELOMPOK ELIT RADIKAL ISLAM MELALUI ISU PALESTINA

Chatrine Debora
Mahasiswi Universitas Jenderal Achmad Yani

Yohanes Sulaiman
Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Kelompok kepentingan menjadi saluran bagi masyarakat dalam mengekspresikan opini atau pandangannya kepada pemerintah yang dimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan bisa juga menjadi tekanan dan menimbulkan masalah baru untuk para pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan yang diputuskan. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini membahas bagaimana kelompok Islam Radikal berusaha mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia melalui isu Palestina. Selanjutnya akan dibahas menggunakan teori kepemimpinan yang dikemukakan Margareth yang menyatakan bahwa pemimpin menjadi aktor penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri dalam interpretasinya yang juga dipengaruhi politik domestik. Teori persuasi elit politik yang dikemukakan Snyder yang menyatakan elit politik menggunakan isu etnis dalam mencapai tujuan politiknya. sebagai kelompok penekan yang digunakan dan saling mendukung dengan partai oposisi pemerintahan Jokowi yakni Gerindra dan PKS yang memiliki kesamaan ide mengenai anti imperialisme dan penjajahan asing berupaya memperbesar pengaruh dengan melakukan mobilisasi massa dalam tujuannya mencapai kursi di pemerintahan dan mempertahankan posisinya dalam masyarakat dengan penyebaran ide dan pemahaman terkait isu Islam. Oleh karena itu, upaya meredam gejolak politik dalam negeri dan mempertahankan kepemimpinan serta kredibilitasnya serta untuk semakin aktif dalam perpolitikan luar negerinya, Jokowi berusaha memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang memperjuangkan ide-ide tersebut dengan ikut fokus dalam perjuangan kemerdekaan Palestina dan menekan kelompok oposisi yang berusaha menurunkan kepemimpinan dalam pemerintahannya bahwa pihak yang memiliki kedudukan dan pengakuan dalam pemerintahan.

Kata Kunci : Elit, kelompok kepentingan, kebijakan

Abstract

The interest groups become a channel for the public to express their opinions or views to the government where public participation in policy making can also be a pressure and cause new problems for policy makers in implementing the policies that are decided. In this regard, this paper discusses how Radical Islamic groups try to influence Indonesia's foreign policy through the Palestinian issue. Next will be discussed using the leadership theory proposed by Margareth which states that leaders become important actors in foreign policy making in their interpretation which is also influenced by domestic politics. Snyder's theory of persuasion of political elites states that political elites use ethnic issues in achieving their political goals. as a pressure group that is used and supports each other with the Jokowi's government opposition party, Gerindra and PKS who have the same ideas about anti-imperialism and foreign colonialism trying to increase their influence by mobilizing the masses in order to achieve seats in government and maintain their position in society by spreading ideas and understanding related to Islamic issues. Therefore, in an effort to reduce domestic political turmoil and maintain leadership and credibility as well as to be more active in foreign politics, Jokowi tries to provide what is desired by the people who fight for these ideas by participating in the Palestinian independence struggle and suppressing opposition groups that trying to reduce leadership in his government that those who have a position and recognition in the government.

Keywords: Elite, interest groups, policies

PENDAHULUAN

Kebijakan luar negeri merupakan cerminan dari kebutuhan domestik negara yang dipengaruhi berbagai faktor termasuk faktor politik domestik maupun internasional. Kondisi politik domestik negara seperti kelompok kepentingan, opini publik, dan media massa menjadi elemen penting yang juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Elemen politik domestik yang akan dibahas yaitu kelompok kepentingan yang didefinisikan sebagai kesatuan warga negara yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.¹ Kelompok kepentingan menjadi saluran bagi masyarakat dalam mengekspresikan opini atau pandangannya kepada pemerintah yang dimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan bisa juga menjadi

¹ R. Meissner, 2015, "Interest Groups, Water Politics and Governance", *SpringerBriefs in Environmental Science VIII* p.2, 2015: 8 diakses melalui <https://www.springer.com/gp/book/9783319211299> (4 Januari 2019)

tekanan dan menimbulkan masalah baru untuk para pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan yang diputuskan.

Kelompok kepentingan juga bisa mempengaruhi keputusan dalam kebijakan luar negeri yang dimana juga bisa dilatarbelakangi oleh tujuan yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan. Kelompok kepentingan yang dimaksud dalam tulisan ini yakni kelompok elit Islam radikal. Indonesia sebagai negara dengan populasi Islam terbanyak di dunia dikenal sebagai negara toleran yang terdiri dari keanekaragaman agama dan sebagai negara demokrasi, Indonesia memberikan ruang bagi kelompok – kelompok Islam untuk berkumpul dan mendirikan organisasi, tempat perkumpulan, bahkan partai politik di seluruh Indonesia secara bebas dan bisa mempublikasikan buku atau pandangan Islamis mereka melalui berbagai media sebagai bentuk kebebasan dalam berserikat dan berpikir. Alasan tersebut yang menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi gerakan radikalisme di Indonesia. Ancaman radikalisme ini dibuktikan dengan adanya kelompok radikal Islam di Indonesia seperti Majelis Mujahidin, Front Pembela Islam (FPI), Hamas Indonesia dan yang lainnya secara aktif mendukung *Islamic State* (IS) yang memiliki tujuan membentuk suatu negara berdasarkan sistem kekhalifahan dan mengimplemetasikan hukum Islam.² Hal tersebut jelas merupakan sebuah ancaman bagi Indonesia karena aspirasi dan tujuan kelompok radikal tersebut bertentangan dengan ideologi negara Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini akan membahas bagaimana kelompok Islam Radikal berusaha mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia melalui isu Palestina. Selanjutnya akan dibahas menggunakan teori kepemimpinan yang dikemukakan Margareth yang menyatakan bahwa pemimpin menjadi aktor penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri dalam interpretasinya yang juga dipengaruhi politik domestik. Selanjutnya, teori persuasi elit politik yang dikemukakan Snyder yang menyatakan elit politik menggunakan isu etnis dalam mencapai tujuan politiknya. Penulis berasumsi bahwa elit politik kelompok Front Pembela Islam (FPI) berusaha menggunakan isu etnis untuk

² Ibid., p. 37.

menekan pemerintah dan memiliki kursi kekuasaan dalam mempengaruhi politik negara dan dalam lingkungan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepemimpinan: *Leaders and Opposition*

Dalam teori kepemimpinan yang dikemukakan Margaret G. Hermann and Joe D. Hagan dijelaskan bahwa persepsi dan interpretasi pemimpin dapat mempengaruhi keputusan kebijakan internasional dan domestik politik. Dijelaskan juga bahwa tekanan dari politik domestik negara dapat menentukan apakah negara tersebut kuat atau lemah dan menekankan kepada para pemimpin pemerintahan bahwa mereka memiliki pilihan tertentu dalam membuat kebijakan politik luar negeri. Peran pemimpin juga penting dalam mengintegrasikan kebijakan luar negeri karena pemimpin juga harus secara efektif bereaksi terhadap tekanan domestik dimana pemimpin bertindak sebagai aktor utama dan strategis yang berada dalam lingkup “*two-level game*” yakni kaitan antara domestik politik dan kondisi internasional. Dalam lingkup politik domestik, pemimpin dihadapkan dengan 2 tantangan yakni membangun koalisi pendukung untuk mempertahankan otoritas atau bersaing dengan kelompok oposisi untuk mempertahankan legitimasi.³

Pemimpin dalam menghadapi hal tersebut memiliki beberapa pilihan alternatif yang pertama yakni dijelaskan bahwa pemimpin yang berusaha untuk menghindari perdebatan dalam negeri akan berusaha untuk mengakomodasi kelompok oposisi dengan memberikan hal yang mereka inginkan dalam kebijakan luar negeri yang biasanya menyebabkan kebijakan yang secara keseluruhan tidak responsif terhadap tekanan internasional dan melibatkan sedikit risiko. Selanjutnya, pemimpin dapat berupaya menggabungkan posisi domestik mereka dengan mendorong sebuah kebijakan luar negeri yang dapat memobilisasi dukungan baru, menekan oposisi atau juga dapat meredam oposisi.

³ Margaret G. Hermann dan Joe D. Hagan, 1998, “International Decision Making: Leadership Matters” diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/1149281> (21 Januari 2019)

Dikaitkan dengan kondisi politik Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara demokrasi dengan sistem presidensial dan multipartai. Scott Mainwaring menyatakan bahwa kombinasi sulit seperti itu bisa menyebabkan ketidakstabilan karena beberapa alasan yang salah satunya yakni kesulitan dalam membangun koalisi antar partai dalam demokrasi presidensial dan akan berpotensi memperburuk stabilitas demokrasi. Dalam masa transisi, pembuat kebijakan memiliki kesempatan yang besar dalam membentuk atau membentuk ulang institusi sesuai dengan kepentingan yang akan dicapai. Dalam sistem presidensial dengan multipartai juga bisa menyebabkan adanya kebuntuan antara badan legislatif yakni DPR, MPR, DPD atau eksekutif yakni presiden dan wakil presiden dalam pengambilan keputusan sehingga terkadang program yang ingin dijalankan mendapat pertentangan antara pihak-pihak di dalamnya dan presiden tidak terlalu mampu menyelesaikan permasalahan seperti ini. Maka dari itu biasanya partai dari presiden merupakan partai yang memiliki mayoritas dalam pemerintahan. Selanjutnya, dalam sistem kombinasi ini presiden membentuk sendiri kabinetnya namun hal ini tidak menjamin partai-partai tersebut akan secara teguh mendukung pemerintahan dari awal hingga selesai kekuasaan pemerintahan.⁴

Teori *Elite Persuasion*

Elit didefinisikan sebagai orang atau sekelompok orang yang berdasarkan posisi strategisnya dapat mempengaruhi hasil politik secara substansial dan teratur.⁵ Elit ini tidak hanya berasal dari pemimpin yang berada di jejeran politisi, senior militer, dll namun juga dari berbagai elemen masyarakat yang dikenal sebagai kelompok atau organisasi massa dan secara politis dapat menggerakkan massa. Dalam negara yang demokrasi, elit politik dapat meningkatkan nasionalisme karena hal tersebut bisa digunakan oleh elit atau kelompok kepentingan yang berkuasa di negara dengan berusaha memanfaatkan

⁴ Scott Mainwaring, 1993, "Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination", *Comparative Political Studies*, Vol. 26(2), hal. 198–228, diakses melalui <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0010414093026002003> (21 Januari 2019)

⁵ John Higley, 2010, "*Elite Theory and Elites*" *Handbook of Politics*, 161–176. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/227272026_Elite_Theory_and_Elites pada 29 April 2019.

kekuatan massa untuk kepentingannya untuk menarik dukungan dari masyarakat demi melawan rival politiknya di dalam negeri atau luar negeri.⁶ Dalam teori persuasi elit, Snyder berasumsi bahwa konflik etnis digunakan oleh para elit politik sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politik terutama pada masa pemilihan yang diprakarsai oleh para elit politik baik elit politik lama dan baru yang merasa posisi kekuasaannya terancam karena demokrasi atau karena institusi pemerintah yang lemah sehingga elit politik membutuhkan cara untuk memobilisasi dukungan massa dan menggunakan isu sentimen nasionalisme tersebut sebagai penggerak kelompok kepentingan yang dapat memberikan dampak yang besar.⁷

Pada masa awal demokrasi, massa cenderung tidak merasakan bahwa nasionalisme merupakan sesuatu yang penting. Namun, begitu praktik demokrasi dimulai yakni pada saat partisipasi politik massa meningkat maka para elit perlu mengumpulkan dukungan pemilihan dengan cara tertentu. Kaum elit politik menyadari bahwa penggunaan nasionalisme bisa dijadikan sebagai alat penyampaian kepentingan kelompok dengan meyakinkan publik untuk menerima ide nasionalis yang memecah belah.⁸ Keadaan seperti itu yang meningkatkan perpecahan dan rasa tidak percaya antara satu kelompok dan kelompok lain yang akhirnya digunakan oleh para elit dengan menggunakan ketidakstabilan identitas nasional tersebut untuk mempromosikan identitas masyarakat. Di beberapa negara, kaum elit lama berusaha untuk mendorong adanya perubahan atau menekan para elit baru untuk membuat perubahan yang mereka klaim bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dan efektif.

Selanjutnya, nasionalisme didefinisikan sebagai sebuah doktrin dimana sekelompok orang yang melihat dirinya berbeda dari aspek kebudayaan, sejarah, institusi, atau prinsip yang seharusnya memerintah mereka dalam sistem politik yang mengekspresikan dan melindungi perbedaan-perbedaan tersebut.⁹ Lalu

⁶ Jack Snyder, *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*, (New York, W.W. Norton & Company, 2000), 36

⁷ *Ibid.*, 19

⁸ *Ibid.*, 32.

⁹ *Ibid.*, 22.

konflik nasionalis didefinisikan sebagai sebuah aksi yang dikelola dalam lingkup besar dengan pembenaran atau motivasi dari doktrin nasionalis. Nasionalisme sebagai doktrin yang digunakan atas nama rakyat namun tidak secara sepenuhnya oleh rakyat, memberikan jalan bagi para elit politik untuk menjadi lebih populer tanpa menjadi sepenuhnya menggunakan cara yang demokratis. Nasionalisme digunakan sebagai pembenaran sebagian bentuk demokrasi dimana para elit politik bertindak atas nama rakyat namun tidak secara penuh bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam menjelaskan persuasi elit politik, Snyder menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan elit politik menggunakan persuasi nasionalisme yakni tergantung pada motivasi dan peluang para elit politik dimana motivasi para elit politik tergantung kepada bagaimana penyesuaian kepentingan mereka terhadap kondisi yang lebih demokratis atau lebih tepatnya bagaimana mereka merasa terancam karena demokrasi tersebut dan peluang yang ada yakni tergantung kepada karakter dari institusi politik negara pada saat partisipasi politik semakin meningkat.¹⁰ Pada negara yang memiliki partisipasi politik yang kecil, institusi administratif yang lemah, kondisi ekonomi dan sosial yang tidak stabil, dan partai politik yang lemah maka para elit nasionalis lebih berpeluang dalam memanipulasi urusan politik dan memunculkan nasionalisme etnis.

Dalam mempromosikan nasionalisme etnis, ide menjadi hal penting karena menjadi unsur pembentukan aksi kolektif melalui pembentukan kelompok yang dibutuhkan oleh nasionalis untuk mencapai kepentingannya dan dapat dimulai dengan kelompok yang dapat memberikan keuntungan bersama sebagai inti dari aksi kolektif yang lebih luas. Kelompok inti tersebut bisa berasal dari berbagai kalangan termasuk elit ekonomi, agama atau budaya, dll yang keduanya semakin meningkatkan kepercayaan bersama dengan adanya interaksi di berbagai aksi bersama. Aksi kolektif yang dilakukan keduanya mengharapkan adanya keuntungan baik secara pribadi maupun bersama yang dimana kelompok inti tersebut memberikan sumber daya dan kampanye persuasif yang berarti menjanjikan mereka sebuah keuntungan-keuntungan tambahan seperti kekuasaan

¹⁰¹⁰ *Ibid.*,

tertentu, hak istimewa, subsidi atau proteksionisme aktivitas mereka dan menjaga aktivitas yang biasa mereka lakukan.

Penggunaan propaganda dan hasutan nasionalis sebagai pilihan yang dibutuhkan dalam kondisi tertentu untuk upaya pengembangan pergerakan massa nasionalis. Sebagai mana elit politik dapat memanipulasi pemilihan umum, elit juga dapat memanipulasi media massa yang menyebabkan massa berhasil dipengaruhi karena adanya struktur pasar ide yang terdapat kontrol terhadap sumber informasi yang dimana monopoli informasi yang dilakukan oleh elit politik dan segmentasi dalam penyampaian informasi dimana saat populasi masyarakat dapat dengan mudah dipengaruhi maka elit politik dapat mengontrol sumber informasi yang ada.¹¹

PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan populasi terbesar keempat di dunia yang memiliki banyak keanekaragaman dari segi agama, sosial, dan budaya. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan banyaknya jumlah warga negara, di satu sisi hal ini bisa menjadi nilai tambah untuk menjadi ciri Indonesia sebagai negara yang demokratis dan beranekaragam. Namun di satu sisi lain menjadi tantangan bagi Indonesia karena banyaknya populasi yang berasal dari latar belakang yang berbeda tersebut juga membawa identitas dan kepentingan yang berbeda. Masyarakat yang beragam secara etnis dan terintegrasi dengan baik tentu saja diinginkan, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa beberapa kelompok menolaknya.

Sebagai negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi presidensial dan sistem multipartai, seperti yang dikemukakan Scott bahwa hal ini bisa menjadi faktor ketidakstabilan politik demokrasi dalam negeri karena banyaknya perbedaan kepentingan dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yang juga bisa menghambat pengambilan keputusan kebijakan terutama dari pihak oposisi pemerintah yang berkuasa di Indonesia sekarang yakni pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Sistem multipartai dan presidensial yang

¹¹¹¹ *Ibid.*,

diimplementasikan di Indonesia masih dalam proses menjadi negara demokrasi yang stabil karena dalam dekade sebelumnya demokrasi tidak menjadi sistem politik yang digunakan di Indonesia dan keadaan demokrasi di Indonesia masih dalam perkembangan. Hal ini yang melatarbelakangi adanya tindakan dan usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak oposisi pemerintah yang memiliki tujuan untuk menjatuhkan pemerintah dan berusaha memiliki posisi kekuasaan dalam kursi politik negara.

Dalam upaya tersebut, elit politik menggunakan berbagai cara agar dapat mencapai kepentingannya dengan menggunakan isu etnis atau nasionalisme. Mengingat proses pencapaian kepentingan tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan dukungan dari berbagai masyarakat, elit politik dalam hal ini Front Pembela Islam (FPI) menjadi instrumen elit partai politik oposisi presiden Jokowi yakni partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo dengan koalisi partai lain yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dll. yang jika dilihat dari kepentingannya yakni membutuhkan dukungan massa untuk menekan pemerintahan Joko Widodo yang sedang berkuasa ditambah dengan ambisi untuk menjadi presiden Indonesia pada pemilihan umum presiden 2019 setelah beberapa kali gagal dalam hasil pemilihan umum presiden di beberapa tahun belakangan dan memperluas pengaruhnya dalam masyarakat. Selain itu, Prabowo juga memiliki latar belakang militer serta berkaitan dengan presiden diktator Indonesia yakni Soeharto yang diasumsikan juga mendapat dukungan dari para elit militer terdahulu yang berharap untuk mengembalikan sistem yang lebih otoriter dan peran militer dalam negara menjadi lebih kuat.¹²

Kelompok radikal Islam Front Pembela Islam (FPI) merupakan organisasi berlandaskan Islam yang menjunjung kesatuan dan persaudaraan umat Islam dan memiliki obsesi memberlakukan syariat Islam serta menolak segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia Barat terutama imperialisme Barat. Organisasi Islam ini semakin menjadi perhatian masyarakat Indonesia pasca reformasi karena sifatnya yang anarkis dan aksi-aksi yang ditimbulkan menumbuhkan ketakutan

¹² Paul Marshall, 2017, "Political Islam in Indonesia", diakses melalui <https://www.weeklystandard.com/paul-marshall/political-islam-in-indonesia-2008333> (21 Januari 2019)

yang akhirnya mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Walaupun banyak menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan dilihat sebagai ancaman terhadap ideologi Indonesia, namun nampaknya pemerintah dan polisi seakan menutup mata terhadap hal ini. Pengamat menyatakan bahwa ada kecurigaan bahwa polisi menutup mata atau terlibat dalam hal ini karena polisi mendapatkan uang untuk perlindungan aktivitas tersebut dan *International Crisis Group* menyatakan bahwa mereka mengidentifikasi bahwa terdapat sejumlah pejabat senior kepolisian Indonesia dan militer yang terkait dengan organisasi FPI dan terkadang memungkinkan FPI untuk melakukan otoritas semi-resmi tersebut.¹³

Di Indonesia, elit kelompok radikal Islam yakni Front Pembela Islam dapat dikatakan berhasil dalam mempengaruhi politik Indonesia karena aksi protes tahun 2016 silam terhadap mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang diduga “melecehkan Islam” dengan menggunakan sentimen etnis dan berusaha menekan pemerintah demi mencapai kepentingan. Aksi tersebut dikelola oleh Front Pembela Islam dan menjadi mobilisasi terbesar pada tahun tersebut yang dimana kurang lebih 200,000 orang berkumpul terdiri dari banyak kalangan yang kebanyakan melabeli dirinya sebagai Muslim konservatif.

Dalam penyebaran ide-ide tersebut terdapat beberapa tahap yakni budidaya yakni upaya menghasilkan orang-orang yang percaya pada ide, lalu interaksi yakni merangkul dan membawa Islam untuk mengambil isu untuk menegaskan kepentingan, dan asumsi kekuasaan dan berkuasa yakni untuk pembentukan pemerintah, penerapan Islam dan menyebar untuk mendapat bantuan dari anggota politisi dan militer dan penyebaran ide melalui media sosial, seminar, demonstrasi publik, pendekatan kepada organisasi mahasiswa, dll.¹⁴

¹³ International Crisis Group ,2008, “Indonesia: Implications of the Ahmadiyah Decree” diakses melalui http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/indonesia/b78_indonesia_implications_of_the_ahmadiyah_decree.pdf (21 Januari 2019)

¹⁴ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Pengkajian Strategi, 2010, “Menghidupkan Kembali Kekhalifahandi Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),Strategi Mobilisasi Dan Dampaknyabagi Indonesia” diakses melalui <https://id.scribd.com/doc/81790325/Mabes-TNI-Gerakan-Hizbut-Tahrir-Indonesia-Strategi-Mobilisasi-Dan-Dampaknya-Bagi-Indonesia> (30 April 2019)

Mobilisasi massa dengan penyebaran ide dan pemahaman tersebut dilakukan dengan cara pendekatan melalui media online seperti website dan media sosial yang dimana dalam hal ini FPI sendiri memiliki website sendiri dan menggunakan aplikasi *Facebook* dengan akun FPI dalam penyebaran idenya. Selain itu juga melakukan seminar dengan khotbah di depan khalayak ramai serta melakukan demonstrasi publik untuk menentang kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka dan juga menekankan adanya peningkatan solidaritas umat Muslim di seluruh dunia terkait isu Palestina dan isu lainnya. Dapat dilihat bahwa hal ini dilakukan sebagai upaya memperoleh dukungan dan pengakuan dari Muslim Indonesia terkait tindakan mereka walaupun memang tidak mewakili kepentingan seluruh Muslim Indonesia, namun hal ini juga untuk mempromosikan pentingnya khalifah Islam dan perlindungan sesama Muslim di dunia sebagai mana tujuan dan pandangan FPI dikatakan.

Selanjutnya dalam upaya mengumpulkan dan mengendalikan massa, FPI dalam upaya dakwahnya membentuk Lembaga Dakwah *Front* melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan pengabdian masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan dan pengajaran mengenai Islam kepada masyarakat yang juga bisa dilihat sebagai upaya pembentukan citranya yang positif di masyarakat.¹⁵ Selain itu juga lembaga ini mengadakan kaderisasi untuk pencarian bibit-bibit orang yang akan direkrut dengan proses pendidikan dan latihan keorganisasian. Proses-proses ini dapat dilihat sebagai dua proses sekaligus yakni budidaya dan interaksi yang bertujuan membentuk ide pandangan serta merangkul kepada tujuan yang diinginkan organisasi. Pada tahap yang ketiga inilah, dimana saat sudah direkrut dan memiliki dasar yang sama dengan pandangan organisasi maka akan diarahkan kepada pembentukan dan penerapan yang lebih luas di luar organisasi yakni terjun ke lembaga atau partai politik pemerintahan. Menyadari pentingnya posisi dan kepentingan yang ingin dicapai, FPI memperluas koneksinya dengan pengiriman anggota-anggotanya ke lembaga pemerintahan

¹⁵ Arip Rahman Hakim, 2014, "Pencitraan Laskar Pembela Islam FPI dalam Mentransformasikan Nilai-Nilai Islam di Tengah Masyarakat", diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26858/1/ARIP%20RAHMAN%20HAKIM-FDK.pdf> pada 30 April 2019

agar bisa berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepentingan organisasi. Pembentukan ide-ide dan perekrutan yang terbuka ini dapat dilihat sebagai upaya FPI untuk membuat anggota-anggota yang terdiri dari simpatisan, anggota yang sudah terikat, dan anggota yang dikirim ke posisi pemerintahan bisa semakin memperluas pengaruh organisasi FPI dalam masyarakat dan mencapai mewujudkan masyarakat Islami. Tujuan dari penyebaran ide tersebut yakni untuk memberikan pemahaman untuk nantinya akan dapat membela atau mendukung saat tenaganya dibutuhkan yakni untuk mobilisasi massa..

Aksi mobilisasi kaum elit politik yang terdiri dari dukungan partai dan anggota FPI tersebut berpengaruh sangat luas hingga banyak mencuri perhatian dunia internasional termasuk Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional termasuk *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* mengatakan bahwa perlu ada pemeriksaan ulang terhadap kasus “penghinaan agama” tersebut dan berpendapat bahwa keputusan memenjarakan Ahok akan merusak reputasi Indonesia untuk toleransi dan pluralisme agama, dan mendesak negara itu untuk mencabut undang-undang penistaan agama yang tidak adil tersebut.¹⁶ Selain menyita perhatian internasional, mobilisasi besar-besaran tersebut juga mempengaruhi presiden Joko Widodo yang batal untuk mengunjungi Australia karena keadaan domestik politik yang sedang memanas.

Dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, dapat dilihat bahwa faktor domestik politik juga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri bagi pemimpin negara. Dalam hal ini yakni elit kelompok kepentingan Front Pembela Islam (FPI) yang menggunakan isu etnis untuk mendapat dukungan mobilisasi massa dan juga legitimasi dukungan besar dari masyarakat. Isu etnis dipakai oleh para elit kelompok kepentingan sebagai senjata untuk memegang kekuasaan politik dan menghasut permusuhan terhadap kelompok lain untuk meningkatkan daya saing politik. Hal ini didukung dengan tekanan kondisi domestik negara yang memberikan peluang kepada elit politik untuk menghidupkan sentimen nasionalis karena elit politik merasa perlu

¹⁶ The Jakarta Post, 2017, “Ahok conviction tarnishes Indonesia’s image: Amnesty International”, diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2017/05/09/ahok-conviction-tarnishes-indonesias-image-amnesty-international.html> (21 Januari 2019)

menambah dan mendapat aliansi massa untuk mempertahankan kondisinya yang lemah. Usaha Front Pembela Islam dalam mempengaruhi masyarakat dilakukan secara dengan agresif, yang dimana dikatakan bahwa dalam mempengaruhi masyarakat sosial secara keseluruhan dimana semakin kuat dan semakin agresif kelompok-kelompok tersebut maka akan semakin tinggi pula kecenderungan negara “mengalah” terhadap agresi tersebut.¹⁷ Hal ini yang menjadi ancaman karena jika mobilisasi dan upaya mempengaruhi opini masyarakat tersebut semakin meluas dan mendalam kepada kelompok-kelompok masyarakat, maka akan tercipta perpecahbelahan dalam masyarakat yang semakin membuat masyarakat bersimpati sekaligus percaya terhadap propaganda tersebut yang akhirnya dikhawatirkan bisa menciptakan gerakan-gerakan penekan pemerintah yang lebih besar, kuat, dan menciptakan ketidakstabilan politik di Indonesia.

Dalam keadaan dimana partai politik dan lembaga institusi negara yang tidak stabil dan lemah, serta banyak kepentingan yang akhirnya menciptakan terbentuknya koalisi. Koalisi partai Gerindra, PKS, dll sudah terlihat sejak tahun 2014 dimana pada masa tersebut calon presiden Prabowo mencalonkan dirinya namun mengalami kekalahan dan menjadi partai oposisi pemerintahan Jokowi. Dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi yang dimulai tahun 2014, sebenarnya kemenangannya didukung oleh berbagai partai politik yang bergabung sebagai koalisi partai pendukung pemerintah yang disebut dengan partai Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari PDI-Perjuangan, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), PKB, PPP, Partai Nasdem, Hanura, PKPI, PSI, dan Perindo yang jika ditotalkan memiliki 68,9% kursi di parlemen. Sedangkan dari partai oposisi yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih yang pada awalnya terdapat Golkar, pada pemilihan umum presiden 2014 memilih untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat dan menyisakan partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera dengan total 20,1% kursi di parlemen. Seperti yang dikemukakan oleh Scott bahwa kombinasi antara sistem multipartai dalam sistem presidensial sangat sulit dan berisiko karena partai dalam kabinet tidak bisa secara teguh mendukung pemerintahan. Hal ini

¹⁷ Jack L.Snyder, 1991, *Myths Of Empire: Domestic Politics And International Ambition*, Ithaca, N.Y., Cornell University Press diakses melalui <https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt32b48h> (21 Januari 2019)

terlihat bahwa pada pemerintahan Jokowi, anggota parlemen dari Partai Amanat Nasional (PAN) menunjukkan ketidakselarasan dan ketidaksetujuan terhadap pemerintahan Jokowi. Selanjutnya hal ini semakin ditekan dengan pimpinan legislatif yang dipimpin oleh partai oposisi yakni Gerindra dengan Fadli Zon, Fahri Hamzah dari PKS yang menunjukkan oposisinya terhadap pemerintah dengan kritik-kritik terhadap kebijakan yang diambil Jokowi termasuk juga mengenai isu-isu luar negeri seperti Uighur, Rohingya, atau Palestina.

Selanjutnya menurut teori persuasif elit, kelompok-kelompok elit yang tersisa dari lingkaran penguasa rezim lama, banyak di antaranya yang memiliki kepentingan, bersaing untuk kekuasaan dan dengan elit baru yang mewakili kekuatan demokrasi yang meningkat. Baik elit lama dan elit baru menggunakan semua sumber daya yang dapat mereka kumpulkan untuk mengerahkan sekutu massa, melalui isu nasionalis, untuk mempertahankan posisi mereka yang terancam karena adanya demokrasi dan untuk menekan penguasa baru. Elit politik menggunakan kekuasaan mereka dalam institusi politik untuk menciptakan alat kaki tangan, mengendalikan agenda politik, membentuk konten informasi media dengan cara lobi melalui kelompok penekan.¹⁸

Front Pembela Islam dijadikan sebagai kelompok penekan yang digunakan para elit politik dalam hal ini yakni elit politik dari partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo, koalisi partainya yakni partai Keadilan Sejahtera, serta pihak lainnya. Isu nasionalisme yang diangkat yakni Isu Palestina yang dimana terdapat kesatuan ide antara partai koalisi dan massa dari kalangan Islam konservatif yang juga fokus pada pengecaman segala bentuk dominasi dan imperialisme bangsa Barat dalam suatu negara dan memperjuangkan hak-hak Muslim Indonesia dan di seluruh dunia. Dengan menggunakan dasar kesatuan ide tersebut, elit politik membutuhkan aksi bersama yang efektif dengan memobilisasi sentimen nasional yakni Isu Palestina yang dipercayai oleh sebagian besar masyarakat bukan merupakan isu wilayah namun menganggap hal tersebut sebagai isu agama dan upaya Barat dalam mendominasi kekuasaan di wilayah tersebut.

¹⁸ Edward D. Mansfield and Jack Snyder, 1995, "Democratization and the Danger of War", *International Security*, Vol. 20, No. 1, diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/2539213> (21 Januari 2019)

Palestina merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada masa awal kemerdekaan setelah dijajah bangsa asing sehingga dirasa perlu juga untuk mendukung Palestina dalam penyelesaian konflik wilayah tersebut. Isu Palestina juga merupakan isu yang sudah lama terjadi dan sebenarnya peran dan perhatian Indonesia sudah ditunjukkan sejak lama karena dapat dilihat dari Indonesia dalam kebijakan luar negerinya yang bebas aktif dan turut serta dalam menciptakan perdamaian, keadilan, dan tidak adanya penjajahan di dunia, memberikan perhatian terhadap isu Palestina termasuk dalam forum multilateral dan Indonesia secara konsisten mendukung perlindungan hak-hak rakyat Palestina termasuk mendukung kemerdekaan Palestina.¹⁹ Indonesia bahkan menjadi tuan rumah dalam *International Conference on the Question of Jerusalem* yang dimana bekerjasama dengan Organisasi Kerjasama Islam sebagai upaya membahas mengenai upaya dukungan terhadap resolusi penyelesaian konflik.

Berkaitan dengan isu tersebut, elit politik menggunakan sentimen nasionalisme tersebut untuk memobilisasi massa melalui FPI dengan adanya gerakan protes FPI melalui “Aksi Bela Palestina” yang didukung ribuan massa yang bisa menjadi perhatian pemerintah karena hal tersebut bisa menjadi tekanan dalam negeri yang bisa semakin meluas. Melihat kepada teori kepemimpinan dari Margareth dalam *Leaders and opposition*, Jokowi memiliki persepsi dan interpretasi sendiri dalam menghadapi tekanan domestik dalam negara terutama karena adanya kelompok oposisi dalam pemerintahannya ditambah kelompok kepentingan yang berusaha menjatuhkan kredibilitas dan kekuasaannya sebagai pemimpin di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan isu Palestina dan kondisi domestik tersebut, Jokowi menyatakan bahwa dalam masa-masa politik terutama dalam masa pemilihan umum presiden, banyak aktor politik yang menggunakan “Politik Sontoloyo” dan “Politik Genderuwo” yakni politik tidak sehat yang ditujukan untuk menarik simpati masyarakat menggunakan politik yang tidak sehat, propaganda penyebaran kebencian, penyebaran ide-ide yang memecah belah

¹⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016, “Isu Palestina”, diakses melalui <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Isu-Palestina.aspx> (21 Januari 2019)

masyarakat.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi berusaha memberi peringatan baik kepada masyarakat atau lawan politiknya untuk tidak menggunakan isu-isu agama untuk memecah belah negara dikarenakan motivasi politik. Berkaca kepada tekanan-tekanan dari kelompok kepentingan dan partai oposisi dalam pemerintahannya, Jokowi berusaha mempertahankan kekuasaan dan menunjukkan kredibilitasnya dengan menekankan pada kebijakan luar negeri Indonesia bahwa Indonesia yang akan terus memperhatikan, ikut berperan dan mendukung dalam penyelesaian konflik di Palestina.

Hal ini salah satunya ditunjukkan Indonesia dengan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan juga menyatakan perlawanan kuat mengenai rencana pemindahan kedutaan besar Australia ke Yerusalem. Pemerintahan presiden Joko Widodo juga menunjukkan solidaritas untuk Palestina dengan menekankan kepada Australia bahwa keputusan memindahkan kedutaan besar tersebut bisa saja melahirkan ketegangan hubungan antar kedua negara jika Australia masih bersikeras memindahkan kedutaannya.²¹ Selanjutnya, sejak terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) mulai Januari 2019-Desember 2020, Indonesia menekankan bahwa isu Palestina terkait dengan upaya memerdekakan Palestina dan perlindungan hak sipilnya akan menjadi bagian dalam proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat PBB serta menegaskan bahwa isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia selama masa tersebut.²²

²⁰ CNN Indonesia, 2018, "Genderuwo - Sontoloyo dan Luntarnya Politik Simbol Jokowi" diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181112122107-32-345837/genderuwo--sontoloyo-dan-luntarnya-politik-simbol-jokowi> (21 Januari 2019)

²¹ Olivia Tasevski, 2018, Jakarta and Jerusalem: Australia's Israel Embassy Decision diakses melalui <https://thediplomat.com/2018/10/jakarta-and-jerusalem-australias-israel-embassy-decision/> (21 Januari 2019)

²² Dian Septiari, 2018, *Support for Palestine remains top priority*, diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2018/09/26/support-palestine-remains-top-priority-fm.html> (21 Januari 2019)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok elit dalam hal ini kelompok Front Pembela Islam sebagai kelompok penekan yang digunakan dan saling mendukung dengan partai oposisi pemerintahan Jokowi yakni Gerindra dan PKS yang memiliki kesamaan ide mengenai anti imperialisme dan penjajahan asing berupaya memperbesar pengaruh dengan melakukan mobilisasi massa dalam tujuannya mencapai kursi di pemerintahan dan mempertahankan posisinya dalam masyarakat dengan penyebaran ide dan pemahaman terkait isu Islam. Isu etnonasionalisme yang digunakan tersebut disebarakan melalui media online dan upaya dakwah di berbagai tempat kepada berbagai lapisan masyarakat untuk menanamkan ide pemahaman terkait isu Islam dan kolonialisasi Barat di Palestina.

Elit politik partai oposisi nasionalis dan agamis yakni Gerindra dan PKS juga menggunakan isu etnis yang memecah belah masyarakat dengan motivasi memobilisasi massa untuk menekan pemerintah dan berupaya mempromosikan diri sebagai pembawa solusi terhadap permasalahan Muslim yang dikenal masyarakat yakni isu Palestina. Terkait dengan kondisi politik domestik Indonesia dimana terdapat partai oposisi dan kelompok kepentingan yang berusaha memengaruhi kepemimpinan pemerintahan yang sedang berjalan, Presiden Jokowi sebagai pemimpin Indonesia menekankan bahwa isu nasionalisme yang digunakan elit politik tersebut merupakan isu dengan tujuan memecah belah dan terkait isu Palestina, Indonesia akan menekankan dalam keanggotaan tidak tetapnya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk konsentrasi upaya memerdekakan Palestina dan memperjuangkan hak-hak sipilnya. Dari hal ini dapat dilihat bahwa dalam upaya meredam gejolak politik dalam negeri dan mempertahankan kepemimpinan serta kredibilitasnya serta untuk semakin aktif dalam perpolitikan luar negerinya, Jokowi berusaha memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang memperjuangkan ide-ide tersebut dengan ikut fokus dalam perjuangan kemerdekaan Palestina dan menekan kelompok oposisi yang berusaha menurunkan kepemimpinan dalam pemerintahannya bahwa pihak yang memiliki kedudukan dan pengakuan dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. 2018. “*Genderuwo - Sontoloyo dan Lunturnya Politik Simbol Jokowi*” diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181112122107-32-345837/genderuwo--sontoloyo-dan-lunturnya-politik-simbol-jokowi> (21 Januari 2019).
- Hakim, Arip Rahman. 2014. “*Pencitraan Laskar Pembela Islam FPI dalam Mentransformasikan Nilai-Nilai Islam di Tengah Masyarakat*”, diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26858/1/ARIP%20RAHMAN%20HAKIM-FDK.pdf> (30 April 2019).
- Hermann, Margaret dan Hagan, Joe. 1998. “*International Decision Making: Leadership Matters.*” diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/1149281> (21 Januari 2019).
- International Crisis Group .2008. “*Indonesia: Implications of the Ahmadiyah Decree.*” diakses melalui http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/indonesia/b78_indonesia_implications_of_the_ahmadiyah_decree.pdf (21 Januari 2019).
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2016. “Isu Palestina.” diakses melalui <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Isu-Palestina.aspx> (21 Januari 2019).
- Mainwaring, Scott. 1993. “*Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination.*” *Comparative Political Studies*, Vol. 26(2), hal. 198–228, diakses melalui <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0010414093026002003> (21 Januari 2019).
- Mansfield, Edward and Snyder, Jack. 1995. “*Democratization and the Danger of War.*” *International Security*, Vol. 20, No. 1. diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/2539213> (21 Januari 2019).
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Pengkajian Strategi. 2010. “*Menghidupkan Kembali Kekhalifahandi Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Strategi Mobilisasi Dan Dampaknyabagi Indonesia*” diakses melalui <https://id.scribd.com/doc/81790325/Mabes-TNI-Gerakan-Hizbut-Tahrir-Indonesia-Strategi-Mobilisasi-Dan-Dampaknya-Bagi-Indonesia> (30 April 2019)

- Marshall, Paul. 2017. "*Political Islam in Indonesia*", diakses melalui <https://www.weeklystandard.com/paul-marshall/political-islam-in-indonesia-2008333> (21 Januari 2019).
- Meissner, R. 2015. "*Interest Groups, Water Politics and Governance.*" *SpringerBriefs in Environmental Science VIII* p.2 , 2015: 8 diakses melalui <https://www.springer.com/gp/book/9783319211299> (4 Januari 2019).
- Septiari, Dian.2018. "*Support for Palestine Remains Top Priority.*" diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2018/09/26/support-palestine-remains-top-priority-fm.html> (21 Januari 2019).
- Snyder, Jack. *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*, (New York, W.W. Norton & Company,2000), 36.
- Snyder, Jack. 1991. "*Myths Of Empire: Domestic Politics And International Ambition*". Ithaca, N.Y., Cornell University Press. diakses melalui <https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt32b48h> (21 Januari 2019)
- Tasevski, Olivia. 2018. "*Jakarta and Jerusalem: Australia's Israel Embassy Decision*" diakses melalui <https://thediplomat.com/2018/10/jakarta-and-jerusalem-australias-israel-embassy-decision/> (21 Januari 2019)
- The Jakarta Post. 2017. "*Ahok Conviction Tarnishes Indonesia's Image: Amnesty International.*" diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2017/05/09/ahok-conviction-tarnishes-indonesias-image-amnesty-international.html> (21 Januari 2019).